AdmInistrativA
Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Volume 5 (2) 2023: 107-115 E-ISSN: 2714-7673
administrativa.fisip.unila.ac.id

ARTICLE

Komunikasi Stakeholder dalam Revitalisasi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lampung Utara (Studi Kasus Wisata Way Tebabeng)

A. Fachrezi Adisa [1], Rahayu Sulistiowati [2], Susana Indriyati Caturiani[3]

[1,2,3]Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Fachrezi, A., Sulistiowati, R, Caturiani, S.I (2023). Komunikasi Stakeholder dalam Revitalisasi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lampung Utara (Studi Kasus Wisata Way Tebabeng) Administrativa 5(2)

Article History
Received: 14 Juni 2022
Accepted: 2 Mei 2023

Keywords:
Synergy, Stakeholders, Tourism Development

ABSTRACT

One of the tourist destinations that is being reappointed by the Regional Government of North Lampung Regency is Way Tebabeng Tourism which previously experienced degradation, currently the local government has begun to revitalise it to become a leading tourism. However, the plan to make Way Tebabeng Tourism as one of the PAD targets is not easy, because until now it is still hampered by various road infrastructure constraints that must be repaired, there is no POKDARWIS (Tourism Awareness Group) coaching. The purpose of this research is to describe how communication between stakeholders in the revitalisation of Way Tebabeng Tourism. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The results of the study found that stakeholder communication is not yet optimal, this can be seen in the communication that has been built but is still one-way and communication is cut off in some stakeholders.

Kata Kunci:
Sinergi, Stakeholder, Pengembangan Pariwisata

ABSTRAK

Salah satu destinasi wisata yang sedang diangkat kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah Wisata Way Tebabeng yang sebelumnya mengalami degradasi, saat ini pemerintah setempat sudah mulai merevitalisasi untuk dijadikan wisata unggulan Namun dalam rencana menjadikan Wisata Way Tebabeng sebagai salah satu target PAD tidak mudah, karena sampai saat ini masih terhalang berbagai kendala infrastruktur jalan yang harus diperbaiki, belum adanya pembinaan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana komunikasi antar stakeholder dalam revitalisasi Wisata Way Tebabeng. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi stakeholder belum optimal hal ini dilihat pada komunikasi sudah terbangun namun masih bersifat satu arah dan komunikasi terputus pada beberapa stakeholder.

* Corresponding Author
Email : mandaezi07@gmail.com

© 2023 Author(s), Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Lampung Utara selain dikenal dengan budaya Lampung pepadunnya, pemerintah daerah setempat ternyata mulai membuka objek wisata baru seperti air terjun maupun sungai dan bendungan. Dengan dibuka destinasi wisata baru berpengaruh pula pada peningkatan wisatawan nusantara dalam kurun waktu 2019-2017 pada tabel berikut ini :

Tabel 1. data kunjungan wisatawan nusantara 2019-2017:

No	Tahun	Jumlah
1	2019	112.705
2	2018	80.000
3	2017	32.000

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara, 2021

Dari tabel 1 tersebut bisa diamati adanya peningkatan wisatawan yang signifikan dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

Salah satu faktor yang membuat potensi wisata di atas mulai dikenal publik adalah bantuan dari elemen masyarakat dalam hal ini adalah *influencer* lokal yang memperkenalkan melalui akun media sosial. Hal ini peneliti amati beberapa tahun belakangan mulai bermunculan beberapa akun instagram mengenai informasi wisata yang belum pernah diketahui publik contohnya adalah dibukanya Taman Wisata Tirta Shinta dan Air Terjun Curup Ekor Kuda. Objek wisata yang cukup dikenal masyarakat luas khususnya para wisatawan yakni Taman Wisata Way Rarem, Agrowisata Bambu Kuning, dan Taman Wisata Tirta Shinta. Dengan jumlah kekayaan potensi wisata yang tak sedikit, Kabupaten Lampung Utarabisa menjadi kabupaten tujuan *traveller* lokal.

Selain destinasi wisata tersebut yang sedang diangkat kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah Wisata Way Tebabeng yang saat ini mengalami degradasi padahal sebelumnya menjadi destinasi unggulan Kabupaten Lampung Utara. Saat ini pemerintah setempat sudah mulai membuka kembali untuk publik, bahkan pembenahan dan perbaikan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjadikan wisata Way Tebabeng menjadi wisata produktif dan unggulan.

Salah satu destinasi wisata yang saat ini direvitalisasi oleh Pemerintah setempat adalah Wisata Way Tebabeng yang sebelumnya mengalami degredasi dengan melakukan pembenahan dan perbaikan untuk menjadikan wisata Way Tebabeng menjadi wisata produktif dan unggulan yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Departemen Kimpraswil (Khairuni,2016) revitalisasi adalah membangkitkan kembali kawasan yang saat ini mati, namun pada masa lampau pernah hidup.

Akan Tetapi dalam menjalankan rencana tersebut masih banyak kendala, hingga sampai saat ini masih objek wisata tersebut belum dibuka secara resmi hal ini dikarenakan infrastruktur jalan yang masih banyak lubang hingga perlu diperbaiki serta belum adanya pemberdayaan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) .\

Untuk merevitalisasi pengelolaan sektor pariwisata perlu didukung komunikasi yang baik antar *stakeholder* khususnya satuan kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Iriantara & Syaripudin dalam Waloni, dkk (2021), menyatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu proses keberlangsungan dari pembuatan dan pertukaran suatu pesan

ataupun informasi dari dalam sebuah jaringan dengan relasi yang saling terkait satu sama lain untuk menyesuaikan dengan ketidakpastian lingkungan. Lebih lanjut Sofyandi dan Garniwa dalam Rahmawati, dkk. (2014) membagi komunikasi Pengertian komunikasi atas orientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi merupakan kegiatan yang mana seseorang (sumber) secara bersungguh-sungguh memindahkan stimulus untuk mengharapkan mendapatkan tanggapan. Pengertian komunikasi atas orientasi penerima melihat bahwa yakni komunikasi merupakan semua kegiatan atau aktivitas dimana seseorang (penerima) itu sendiri menanggapi atau merespon stimulus atau rangsangan dari sumber.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Sulistiowati, dkk. (2020) dalam mengelola pariwisata harus melibatkan pemangku kepentingan yang masing-masing memiliki peranan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.

Komunikasi *stakeholder* dalam pengembangan kepariwisataan dibutuhkan untuk mencapai tujuan. karena sektor pariwisata yang dikembangkan atau dikelola dengan baik dapat menciptakan industri pariwisata yang menguntungkan seperti contohnya menambah PAD daerah.

Atas dasar uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji "Komunikasi *Stakeholder* Dalam Revitalisiasi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lampung Utara (Studi Kasus Wisata Way Tebabeng)".

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengkaji, karena peneliti ingin menguraikan hasil penelitian berdasarkan metode wawancara dan observasi serta dokumentasi, yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana komunikasi stakeholder dalam revitalisasi pengembangan Wisata Way Tebabeng.

Informan penelitian telah ditetapkan sebelumnya dengan didasarkan pada fokus penelitian, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dengan tepat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 1). Wawancara, 2). Observasi, 3). Dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan 1). Reduksi data, 2). Penyajian data, 3). Penarikan Kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Stakeholder ialah kelompok ataupun individu yang dipengaruhi dan mempengaruhi oleh adanya suatu tujuan pencapaian dari sebuah program Freedman (Aryono, 2019). Pada hasil penelitian, identifikasi peran masing-masing *stakeholde*r, dapat dipetakan menjadi 4 bagian kelompok bedasarkan teknik *pemetaan stakeholder* dari Aden dan Ackermann dalam Handayani dan Warsono (2017) bahwa *stakeholde*r dapat dipetakan dengan teknik *power Versus Interest Grid*. Yakni suatu teknik analisis dengan memfokuskan pada power dan *interest* yaitu :

a. POKDARWIS dikualifikasikan sebagai *subjects,* yakni *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Hal ini didasari oleh POKDARWIS sebagai salah satu pihak pengelola yang merawat sekaligus garda terdepan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung destinasi wisata, namun sayangnya kepentingan yang besar itu tidak diimbangi pengaruh yang besar pula, hal ini didasari POKDARWIS yang masih kurangnya pembinaan dan pemberdayaan sehingga dalam realisasinya POKDARWIS hanya bekerja sesuai perintah dari Dinas Pariwisata dan hanya baru sebatas menjalankan operasional parkir
b. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagai *key players* merupakan *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Hal ini didasari

bahwa revitalisasi destinasi wisata Way Tebabeng merupakan proyek dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini DISPORAPAR bersama dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

c. *Crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Dalam hal ini *crowd* adalah ITERA (Intitute Teknlogi Sumatera), hal ini didasari bahwa pihak ITERA hanya terlibat kerjasama dengan DISPORAPAR dalam rangka pembuatan *site plan* saja, setelah *site plan* jadi maka hasil implementasi pembangunan pihak ITERA sudah tidak ikut terlibat.

Komunikasi *stakeholder* dalam revitalisasi pengembangan Wisata Way Tebabeng

Komunikasi merupakan langkah awal dalam penetapan Wisata Way Tebabeng sebagai wisata unggulan Kabupaten Lampung Utara. Bedasarkan pendapat Sofyandi dan Garniwa dalam Rahmawati, dkk. (2014) tentang definisi komunikasi:

Sofyandi dan Garniwa dalam Rahmawati, dkk. (2014) komunikasi orientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi merupakan kegiatan yang mana seseorang (sumber) secara bersungguh-sungguh memindahkan stimuli untuk mengharapkan mendapatkan tanggapan. yang digunakan sumber dalam meyampaikan informasi merupakan alat, metode atau wadah yang dilakukan komunikator dalam hal ini adalah DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara sebagai *stakeholder* kunci dalam menyampaikan informasi mengenai akan dijadikannya Way Tebabeng sebagai wisata unggulan,

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, dapat diketahui bahwa komunikasi yang digunakan oleh *stakeholder* merupakan komunikasi organisasiyang menurut Iriantara & Syaripudin dalam Waloni, dkk. (2021), menyatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu proses keberlangsungan dari pembuatan dan pertukaran suatu pesan ataupun informasi dari dalam sebuah jaringan dengan relasi yang saling terkait satu sama lain untuk menyesuaikan dengan ketidakpastian lingkungan. Hal ini terlihat bahwa komunikasi yang terjalin berawal dari komunikasi internal (dalam organisasi) komunikasi internal terjadi dengan dimulainya DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara mengkomunikasikan hasil gagasan internalnya kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara akan keterbutuhan masyarakat Lampung Utara terhadap destinasi wisata, maka dimulai dengan mengkaji dan memetakan potensi wisata yang ada dan realistis untuk pembangunan dalam jangka pendek dengan mengikuti kaidah sapta pesona yaitu itu tujuh konsep yang tujuannya untuk meningkatkan tanggung jawab, rasa kesadaran setiap lapisan atau elemen masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataan dan mampu untuk mewujudkannya.

Tujuh sapta pesona tersebut terdiri dari keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukkan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Singkatnya tercetuslah untuk merevitalisasi atau membangun kembali Wisata Way Tebabeng. Hal ini dikarenakan sebelumnya Way Tebabeng merupakan destinasi wisata yang pernah hidup namun kemudian terbengkalai puluhan tahun. Revitalisasi sendiri menurut Kimpraswil dalam Khairuni (2016) ialah usaha untuk menghidupkan atau membangkitkan kembali kawasan yang saat ini mati, namun pada masa lampau pernah hidup serta mengembangkan kawasan tersebut untuk menemukan dan meninjau kembali potensi-potensi yang ada.

Wisata Way Tebabeng dipilih dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan seperti Bendungan Way Tebabang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, lalu lokasi tersebut berada di perbatasan Lampung Utara dan Lampung Tengah yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen sehingga mempunyai potensi lebih dan cepat untuk direalisasikan. dari Lalu Bupati Kabupaten Lampung Utara setuju dan mendukung gagasan tersebut yang kemudian DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara mulai melakukan rapat

untuk menyusun *site plan* Wisata Way Tebabeng (seharusnya *master plan* karena kendala keterbatasan dana) yang dibuat dengan menggandeng akademisi yaitu dari pihak ITERA (Institut Teknologi Sumatera).

Setelah *site plan* jadi maka DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara mulai mengadakan komunikasi dalam lingkup besar bersama satuan kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam sebuah rapat formal. Komunikasi tersebut berupa rapat pemaparan *site plan* terkait revitalisasi Wisata Way Tebabeng yang diketahui terinspirasi dari wisata *Floating Market* di Lembang yang memang ternyata secara potensi memiliki kesamaan karakteristik yakni sebelumnya *Floating Market* lembang merupakan sebuah danau biasa yang sering digunakan sebagai tempat pemancingan sementara Way Tebabeng merupakan bekas wisata bendungan yang sudah lama terbengkalai sehingga digunakan sebagai tempat pemancingan ikan oleh warga setempat untuk mata pencaharian.

Dari pola komunikasi yang terjadi dapat dilihat dengan pendekatan Pace dan Faules dalam Waloni, dkk. (2021) yakni; Komunikasi vertikal ke bawah, komunikasi vertikal ke atas dan komunikasi horizontal.

a. Komunikasi Vertikal ke atas

Komunikasi vertikal ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi atau pesan yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) sampai ketingkat yang lebih tinggi (atasan/pimpinan). Arah komunikasi ini terjadi ketika DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara mulai menyampaikan gagasannya kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Kabupaten Lampung Utara terkait keterbutuhan masyarakat dengan minimnya destinasi wisata. Dari komunikasi tersebut Bupati Kabupaten Lampung Utara menyetujui dan meminta untuk menindak lanjuti.

Dari hasil wawancara dapat diketahui pula bahwa media atau alat komunikasi berdasarkan temuan peneliti pada arah komunikasi organisasi vertikal ke atas berupa media lisan dan tertulis. Hanya saja yang lebih dominan adalah media lisan.

b. Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal merupakan suatu penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat atau sejajar dalam sebuah unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu individu atau kelompok-kelompok yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan atau pimpinan yang sama pula. Dapat disimpulkan bahwa unit kerja tersebut merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Lampung Utara dan atasan yang merupakan Bupati Kabupaten Lampung Utara.

Arah komunikasi ini terlihat ketika dimulainya DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara berdiskusi bersama BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara membahas atau menindaklanjuti persetujuan dari Bupati Kabupaten Lampung Utara, dari hasil diskusi tersebut BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara meminta kelengkapan dokumen berupa *master plan* Way Tebabeng yang digunakan untuk bahan pemaparan. Selanjutnya dari pertemuan bersama BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara, DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara tidak menyanggupi untuk pembuatan *master plan* karena dana tidak mencukupi sehingga hanya dibuat *site plan*.

Kemudian setelah *site plan* jadi maka mulailah DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara mengadakan rapat dalam lingkup lebih besar, rapat tersebut merupakan rapat gabungan bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Lampung Utara yang dihadiri beberapa dinas yang akan terkait dengan rencana revitalisasi Wisata Way Tebabeng serta dipimpin oleh Bupati Kabupaten Lampung Utara.

Keberlanjutan pertemuan dan diskusi pemaparan tersebut, DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara masih berkomunikasi dengan beberapa OPD yang hadir seperti BAPPEDA

Kabupaten Lampung Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara.

Dapat diketahui pula media komunikasi yang dipakai oleh *stakeholder* dalam hal ini berupa media lisan tatap muka secara langsung dan tertulis yaitu sebuah *site plan* yang dijadikan materi atau bahan yang dipresentasikan oleh DISPORAPAR pada saat rapat pemaparan. Selain itu keberlanjutan komunikasi media yang mendominasi adalah media elektronik berupa telepon.

c. Komunikasi Vertikal Ke Bawah

Komunikasi kebawah didalam suatu organisasi berarti bahwa pesan ataupun informasi yang ada mengalir dimulai dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi (atasan/pimpinan) kepada mereka yang berotoritas lebih rendah (bawahan).

Dalam hal ini komunikasi vertikal ke bawah terlihat pernyataan dari hasil wawancara dengan DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara bahwa setelah pemaparan *site plan* Bupati Kabupaten Lampung Utara selaku pimpinan mengeluarkan perintah lisan atau statemen untuk menjadikan wisata Way Tebabeng sebagai wisata unggulan Kabupaten Lampung Utara. Media yang digunakan sumber berupa media lisan hal ini terlihat ketika Bupati Kabupaten mengeluarkan *statement* atau perintah lisan untuk menjadikan WisataWay Tebabeng sebagai wisata unggulan Kabupaten Lampung Utara.

Selain analisis terkait arah atau pola komunikasi organisasi, peneliti juga menemukan adanya jaringan komunikasi formal dan informal yang keduanya merupakan jaringan yang saling bersinergi satu dengan hal ini diungkapkan Thoha dalam Sudrajat (2014) juga menyatakan hal yang hampir serupa bahwa komunikasi organisasi formal merupakan proses komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam suatu struktur organisasi. Sebaliknya jaringan komunikasi yang informal terbentuk berdasarkan dari suatu hubungan – hubungan sosial yang dapat memiliki kekuatan untuk menuangkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan melalui sistem formal dengantujuan pesan tersebut dalam langsung diterima sesuai dengan sistem jaringan komunikasi formal.

Komunikasi Formal dapat dilihat dari temuan keterangan informan bahwa komunikasi di awal-awal dalam hal ini baik berupa pengkajian internal DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara, Pembuatan *site plan* sampai pada pemaparan *site plan* dihadapan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Lampung Utara pada saat didominasi oleh rapat formal.

Sementara setelah pemaparan atau tindak lanjut setelah rapat pemaparan *site plan*, komunikasi terjalin secara informal hal ini seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan seperti Dinas PUPR yang mengungkapkan komunikasi terjalin secara kunjungan langsung berupa diskusi serta Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara serta POKDARWIS Wisata Way Tebabeng yang banyak menggunakan komunikasi telepon. Hal ini seperti yang terjadi pada penelitian oleh Dwinugraha (2017) yang mengungkapkan bahwa komunikasi aktor dalam penyelenggaraan pemerintahaan di Desa Urek-Urek Kabupaten Malang, Jawa Timur. Terjadi secara formal dan informal. Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat telah berlangsung baik.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi atas orientasi pada sumber dalam hal ini adalah aktivitas DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara dalam menyampaikan informasi kepada pihak penerima terjadi secara vertikal ke atas, vertikal ke bawah dan horizontal. Serta komunikasi yang terjalin berbentuk formal dan informal.

Komunikasi Orietasi penerima

Bedasarkan penyampaian informasi dari sumber dalam hal ini DISPORAPAR dan respon dari penerima sesuai pengertian komunikasi atas orientasi penerima oleh Sofyandi dan Garniwa dalam Rahmawati (2014), komunikasi pada *stakeholder* sudah terjalin namun

tidak kontinu atau respon yang ada tidak berkelanjutan. Hal ini bisa dilihat dari persiapan DISPORAPAR sebelumnya yang berkomunikasi dengan Bupati Kabupaten Lampung Utara terkait gagasan dibangunnya destinasi wisata lalu kemudian menyusun *site plan* bersama ITERAdan memaparkannya dalam sebuah rapat bersama satuan kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten LampungUtara pada saat itu.

Stimulus yang disampaikan oleh DISPORAPAR direspon positif oleh penerima dalam hal ini adalah *stakeholder* dengan ikut hadir dan mendukung rencana revitalisasi Wisata Way Tebabeng tersebut dan ikut interaktif memberikan masukan bahwa untuk mengantisipasi anggaran yang terbatas diperlukan penyusunan RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) yang dibagi berdasarkan KPP (Kawasan Pengembangan Pariwisata) untuk mendapatkan dana bantuan APBN/DAK dari pusat karena dana APBD tidak dapat membantu pembangunan. Serta respon dari Bupati Kabupaten Lampung Utara yang langsung memberikan perintah atau himbauan lisan untuk menjadikan atau memprioritaskan Wisata Way Tebabeng sebagai wisata unggulan Kabupaten Lampung Utara.

Dari Pernyataan informan juga dapat diketahui bahwa terdapat 3 pola respon yang berlangsung dimana peneliti menganalisis dengan pendekatan dari Effendy dalam Sanati (2016) bahwa pola komunikasi terdiri atas 3 macam, yaitu:

a. Pola komunikasi satu arah, merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, tanpa adanya suatu umpan balik dari komunikan dengan kata lain komunikan bertindak hanya sebatas pendengar saja. Pola komunikasi ini ditemukan dari keterangan POKDARWIS Wisata Way Tebabeng yang mana mengungkapkan bahwa hanya bertugas untuk menerima dan bergerak atas komando dari DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara belum ada pengelolaan lebih lanjut dari POKDARWISsendiri karena terbatasnya anggaran.
b. Pola komunikasi dua arah atau timbal balik (*two way traffic communication*) merupakan yakni komunikator dan komunikan saling terkait untuk tukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka. Pola komunikasi dua arah ini ditemukan dari keterangan DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara bersama BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara terkait keberlanjutan pembangunan *site plan*. Contohnya seperti BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara yang turut menindaklanjuti untuk pembuatan kelengkapan dokumen berupa *master plan* yang dari DISPORAPAR menanggapi tidak mampu membuat *master plan* hanya dapat membuat *site plan* karena keterbatasan dana.
c. Pola komunikasi multi arah adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam sebuah kelompok atau grup yang dalam lingkup lebih banyak. Dimana komunikator dan komunikan saling terkait untuk bertukar pikiran dengan berdialog. Pola komunikasi ini ditemui dari keterangan DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara yang membuat sebuah rapat besar dengan mengundang beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan rapat tersebut dipimpin oleh Bupati Kabupaten Lampung Utara. Dari rapat tersebut diketahui bahwa OPD yang terkait seperti BAPPEDA dan dinas-dinas ikut hadir dan merespon positif serta interaktif terhadap rencana revitalisasi Wisata Way Tebabeng, dari dialog tersebut pula ditemukan pembahasan mengenai anggaran dan penyusunan RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) sebagai masukan dari komunikan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa respon atau tanggapan dari pihak penerima hanya berlangsung di awal saja dan tidak berkelanjutan karena interaksi timbal balik informasi hanya terjalin dengan beberapa OPD seperti Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan yang masih berkomunikasi dalam bentuk informal. namun komunikasi tersebut

terputus pada beberapa OPD seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Diketahui penyebabnya adalah anggaran yang terbatas sehingga komunikasi tidak berjalan kontinu, selain itu ditemukan komunikasi yang masih satu arah pada POKDARWIS. Dimana POKDARWIS hanya sebatas menerima informasi dan menjalankan arahan dari DISPORAPAR. Hal ini menyebabkan tidak interaktif dan inefektifnya komunikasi yang berlangsung. Kurang interaktif dan inefektif komunikasi yang terjadi di antara *stakeholder* dalam revitalisasi Wisata Way Tebabeng nantinya akan mempengaruhi jalannya koordinasi. Hal ini seperti yang terjadi pada penelitian oleh Rahmawati, dkk. (2014) yang mengungkapkan bahwa komunikasi *stakeholder* pada program SEMIPRO (seminggu di Kota Probolinggo, Jawa Timur) kurang begitu efektif dan interaktif sehingga masih bersifat satu arah.

Penyataan-pernyataan di atas merupakan hasil penggalian data dan analisis oleh peneliti melalui teknik wawancara. Selain peneliti menggali data dengan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Namun kekurangan pada penelitian ini terkait sub komunikasi untuk hasil observasi dalam pembahasan komunikasi tidak peneliti sertakan karena komunikasi yang berlangsung sudah lewat dan kekurangan lain adalah hasil dokumentasi dimana tidak mendapati sebelumnya peneliti sudah berupaya menggali data baik berupa hasil foto, video ataupun notulensi rapat pada saat rapat atau komunikasi yang berlangsung oleh pihak penerima dalam hal ini OPD dan POKDARWIS.

D. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi *stakeholder* sudah terjalin diawal perencanaan hal ini dilihat dari cara yang digunakan komunikator dalam menyampaikan komunikasi berupa komunikasi formal dan informal, pesan/informasi yang telah sampai pada komunikan namun dalam *Respon* dan tindak lanjut komunikasi tidak semua *stakeholder* merespon balik stimuli yang diberikan oleh komunikator dalam hal ini adalah DISPORAPAR Kabupaten Lampung Utara, hal itu karena ada beberapa *stakeholder* yang ternyata sudah tidak terjalin komunikasi setelah rapat pemaparan *site plan* tahun 2019 selain itu diketahui beberapa media yang digunakan dalam berkomunikasi berupa media lisan dan telepon.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah DISPORAPAR sebaiknya membangun kembali komunikasi kepada pimpinan baik itu BUPATI/ SEKDA untuk menggalakkan kembali rencana revitalisasi Wisata Way Tebabeng. Selanjutnya DISPORAPAR dapat membangun kerjasama dengan pihak akademisi sesuai keterbutuhan, misalnya terkait pemberdayan dan pembinaan POKDARWIS bisa bekerjasama dengan pihak Universitas Lampung dalam hal ini jurusan Admnistrasi Negara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

Aryono, S. 2019. *Koordinasi Multi-Stakeholder Dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pringsewu.* Skripsi. Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung.

Dwinugraha, A. P. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). PUBLISIA. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1-7.*

Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *6*(3), 40-53.

Khairuni, Zhili.I. 2016. Revitalisasi Kawasan Wisata Kota Medan Sebagai Usaha Meningkatkan Nilai Sosial dan Budaya: Studi Kasus Kawasan Pagaruyung Kota Medan. *Jurnal ArchiGreen*, 3 (5).

Rahmawati, T. (2014). *Sinergitas stakeholders dalam inovasi daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Sanati, I. (2016). Pola Komunikasi Verbal dan Non-Verbal Antara Mahasiswa Asing Dengan Mahasiswa Lokal. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sudrajat, M. 2014. Pola Komunikasi Organisasi di Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Skripsi. Universitas Islam Syarief Hidayatullah.

Sulistiowati, R., Meiliyana, Maarif, A,. & Meilinda, S. D. 2020. Stakeholder Partnership in the Management of Marine tourism in South Lampung Regency, Lampung. *Indonesia Journal of Tourism and Leisure*. 01 (2).

WALONI, K. I., LENGKONG, F., & MAMBO, R. (2021). Komunikasi Organisasi di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik, 7*(108).